

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI KOTA
PALEMBANG
(STUDI KASUS PADA KEPENGURUSAN PARTAI ISLAM DI PARTAI
Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa
DEWAN PIMPINAN CABANG DI KOTA PALEMBANG)**

**Diajukan Sebagian Salah Satu Syarat untuk Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



**Nyimas Putri Rahayu
07021381722169**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK
DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PADA KEPENGURUSAN
PARTAI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA DI DPD KOTA PALEMBANG)**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1**

Oleh :

Nyimas Putri Rahayu
07021381722169

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

Dr. Zulfitri Salehan, M.A
NIP. 1959072015185031002

Pembimbing II

Dr. Hj. Eva Lidya, M.Si

NIP. 19591021419050323002



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198003112003122003

GESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK
DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PADA KEPENGURUSAN
PARTAI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA DI DEWAN PIMPINAN CABANG KOTA PALEMBANG)**

Skripsi

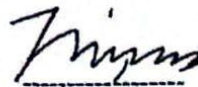
Oleh :

Nyimas Putri Rahayu
07021381722169

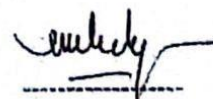
**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada Tanggal**

Pembimbing I

1. Dr. Zulfikri Suleman, M.A
NIP. 195907201985031002



2. Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002



Penguji :

1. Dr. Ridhah Taqwa, M.Si
NIP. 196612311993031018

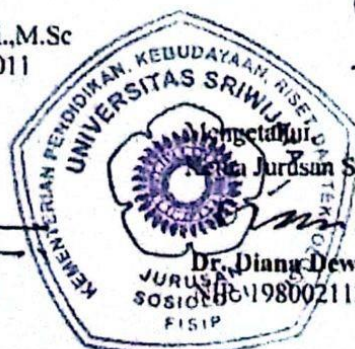


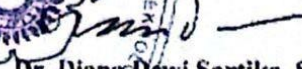
2. Muhammad Izzudin, S.Si., M.Sc
NIP. 198806222019031011



Dekan


Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004




Dr. Dianing Dewi Sartika, S.Sos, M.Si
NIP. 198002112003122003

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyimas Putri Rahayu

NIM : 07021381722169

Tempat Tanggal Lahir: Palembang. 06 September 1999

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “ Partisipasi Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa Di Dewan Pimpinan Cabang Kota Palembang)”. Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini benar-benar asli hasil karya sendiri bukan plagiarisme dan pencurian hasil karya orang lain kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan hasil skripsi ini adalah jiplakan yang diberikan oleh Universitas saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Putri Rahayu)

NIM : 07021381722169

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Mengutip dari Q.S Al-Bagarah:285 yaitu:

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakan dan dia mendapatkan (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami.

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”. Dan doa itu harus diulang-ulang secara terus menerus ya, jangan capek karena Tuhan selalu mendengar doa apa yang kita selalu langitkan. Mengkin suatu saat nanti pasti Tuhan beriakn, jika belum berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk setiap doa yang kita langitkan.”

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan karunia-nya
- ❖ Untuk kedua orang tuaku dan terima kasih Ayahanda Kemas Akhiriyan dan Ibunda Sumiati yang selalu senantiasa memotivasiku, menjadi penyemangat dan selalu mendoakan keberhasilan kami anak-anaknya
- ❖ Dan untuk kedua saudaraku, ayunda Nyimas Nabilatul Fithriyyah dan ananda Kemas Muhammad Riyan Pratama
- ❖ Keluarga besarku
- ❖ Seluruh guru dan dosenku tanpa terkecuali
- ❖ Seluruh teman seperjuangan
- ❖ Almamater kebanggaan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Partisipasi Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Dan Partai Kebangkitan Bangsa Di Dewan Pimpinan Cabang Kota Palembang)”.

Penulis bersyukur tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak mampu untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan bisa menamatkan pendidikan Strata 1 di Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafaatnya di akhirat nanti.

Penulis juga bersyukur pada kesempatan ini bisa membuat karya walaupun dalam penulisannya masih banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Besar harapan penulis supaya skripsi ini dapat bermanfaat, terutama untuk kemajuan masyarakat dan civitas akademika Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Zulfikri Suleman, MA, selaku pembimbing I untuk setiap; arahan, saran, kepercayaan, waktu dan kesabaran Bapak, yang sangat berarti bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si, selaku pembimbing II untuk setiap arahan, saran, waktu, kepercayaan, dan kesabaran ibu, yang sangat berarti bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos, M.Si., selaku pembimbing akademik untuk setiap wejangan, saran, kepercayaan, dan waktu ibu yang sangat berarti bagi peneliti.

8. Mbak Irma Septiliana, selaku administrasian jurusan sosiologi untuk setiap bantuan, waktu, dan saran yang diberikan.
9. Seluruh Dosen, staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, yang memberikan banyak ilmu dan membantu dalam seluruh proses perkuliahan.
10. Seluruh informan dalam penelitian ini, untuk waktu dan kesediaan bapak/ibu untuk diteliti.

RINGKASAN

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI KOTA PALEMBANG: STUDI KASUS PADA KEPENGURUSAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN PARTAI KEBANGSAKITAN BANGSA DI DEWAN PIMPINAN KAMPUS

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap partisipasi perempuan dalam kehidupan politik di Kota Palembang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayah Kemas Akhriyhan, M. Pd, Ibu Sumiati, S. Ti, Keb dan adek-adek tersayang Nyimas Nabilatul Fithriyyah, Kemas Muhammad Riyan Pratama yang sudah mensupport dan mendo'akan agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap partisipasi perempuan dalam kehidupan politik di Kota Palembang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayah Kemas Akhriyhan, M. Pd, Ibu Sumiati, S. Ti, Keb dan adek-adek tersayang Nyimas Nabilatul Fithriyyah, Kemas Muhammad Riyan Pratama yang sudah mensupport dan mendo'akan agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.

12. Seluruh teman-teman seperjuangan di kehs sosiologi 2017, Kampus Palembang dan teman-teman KKN 2020 Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi di balik keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan partai dan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya domain cross-sectional, untuk mengeksplorasi topik tersebut secara komprehensif. Metode kualitatif dipilih untuk menangkap realitas dan nuansa yang dihadapi perempuan dalam partisipasi politiknya. Berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk memastikan keakuratan dan objektivitas data yang dihasilkan. Alasan dan hambatan keterlibatan perempuan dalam politik, sebagaimana diidentifikasi oleh PKS dan PKB di Palembang, meliputi mewakili aspirasi perempuan, meningkatkan kompetensi, dan membina keterampilan.

Kata Kunci : Partisipasi Perempuan, Kehidupan Politik, Kepengurusan Partai

Nyimas Putri Rahayu

Palembang, Juni 2024

Disetujui Oleh
Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]

Dr. Zulfari Sulaiman, MA
NIP. 195907201985031002

[Signature]

Dr. Hj. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241983032002



ABSTRACT

THE PARTICIPATION OF WOMEN IN POLITICAL LIFE IN PALEMBANG CITY (A CASE STUDY ON THE MANAGEMENT OF THE PROSPEROUS JUSTICE PARTY AND THE NATIONAL AWAKENING PARTY IN THE BRANCH COUNCILS OF PALEMBANG CITY)

This study focuses on examining the participation of women in political life in Palembang city, specifically in the management of the Prosperous Justice Party (PKS) and the National Awakening Party (PKB) in the Palembang City Branch Leadership Council. The research aims to gain a deeper understanding of the motivations behind women's involvement in party management and to determine the extent of their participation. The study adopts a qualitative approach, specifically a cross-sectional design, to explore the topic comprehensively. The qualitative method is chosen to reveal the realities and challenges faced by women in their political participation. Various data collection techniques such as observation, interviews, and documentation are employed to ensure the accuracy and objectivity of the data gathered. The reasons and obstacles for women's involvement in politics, as identified by the PKS and PKB in Palembang, include representing women's aspirations, enhancing their abilities, and fostering their skills.

Keywords: Women's Participation, Political Life, Party Management

Palembang, Juni 2024

Approved by

Advisor I

Dr. Zulfibri Sulman, MA
NIP.195907201985031002

Advisor II

Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si
NIP.19591024 1985032002



Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M. Si
NIP.198002112003122003

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
.....	Error! Bookmark not defined.
.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	viii
Gambar 2.1 Kerangka Konsep pemikiran.....	16..... xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
2.1 Tinjauan Pustaka.....	10
2.2 Kerangka Pemikiran / Kerangka Konsep.....	15
BAB III	17
METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Design Penelitian	17
3.2 Lokasi penelitian.....	17
3.3 Strategi penelitian.....	17
3.4 Fokus penelitian.....	17
3.5 Jenis dan sumber penelitian.....	18
3.5.1 Sumber Primer.....	18
3.5.2 Sumber sekunder.....	18
3.6 Penentuan informan.....	18
3.7 Peranan penelitian.....	19
3.8 Unit analisis data.....	19
3.9 Teknik pengumpulan data.....	20
3.10 Teknik pemeriksaan dan keabsahan data.....	21
3.11 Teknik analisis data.....	21
3.12 Jadwal penelitian.....	22
BAB IV	23
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	23
4.1 Pendirian Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	23
4.2 Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa Nasional Dan Lokal	26
BAB V	36
HASIL DAN PEMBAHASAN	36

Perempuan yang dulunya tidak diperkenankan sekolah hanya diperbolehkan membersihkan rumah, memasak, menjahit, dan mengurus anak, kini dapat mencicipi akses pendidikan. Tugas dan tanggung jawab seorang perempuan bukanlah sekedar menjadi pelengkap isi rumah tangga. Namun harus bisa membicarakan arah kemajuan bangsanya.....	37
BAB VI	37
PENUTUP	38
6.1 KESIMPULAN	38
6.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
1.1 References	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterwakilan Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8
Tabel 1.2 Keterwakilan Perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).....	8
Tabel 4.2 Tugas dan Fungsi-fungsi Jabatan	33
Tabel 4.3.1 Informan	35

DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Konsep pemikiran.....	16
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam setiap perkembangan politik akan ada sosok perempuan di setiap elemen pemerintah sekarang ini. Baik di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten contohnya Presiden, Gubernur, Walikota maupun Bupati. Melihat dari perkembangan dari zaman ke zaman akan ada keterwakilan perempuan dari setiap elemen pemerintahan, namun pada kenyataannya memang tidak sebanyak jumlah laki-laki di setiap zamannya. Di zaman nya presiden ibu Megawati Soekarno Putri, kita mulai bisa merasakan kesetaraan bahwa perempuan ternyata bisa memimpin di negara ini.

Namun semua itu tidak akan terlepas dari sebuah kendala dalam memimpin atau memulai masuk ke dalam kehidupan politik ini khusus nya kaum perempuan. Adapun kendala-kendala yang di hadapi para kaum perempuan yaitu, kurangnya dukungan dari setiap keluarga, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar team dan keadaan finansial yang sangat mempengaruhi kaum perempuan untuk berkembang lebih maju lagi.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan hari ini adalah luasnya kesempatan kerja dan berkarir dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi dan pendidikan. Hari ini kita melihat bahwasannya sudah banyak wanita yang mulai berkarir dalam dunia politik seperti presiden Indonesia ibu Megawati Soekarno Putri, selain itu ada beberapa wanita yang sukses dan berkompetisi dalam dunia politik selain itu pada berbagai daerah terdapat perempuan yang jadi pemimpin seperti gubernur Jawa Timur Ibu Khofifa Indar Parawansyah, ada juga Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya. Selain itu kita juga bisa melihat banyak muncul figur-figur srikandi pada parlemen dan dewan perwakilan rakyat yang menjabat dan ikut bersaing dengan kaum laki-laki.

Di samping itu, wanita seringkali diiringi opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga. Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut peran perempuan pada pembangunan sehingga kiprah wanita ini diklaim dengan “peran perempuan pada pembangunan”. Adanya tuntutan peran perempuan pada pembangunan menimbulkan pengertian peran ganda atau mitra sejajar. Akan tetapi, kiprah wanita Indonesia dengan peran ganda dan menjadi kawan sejajar pada pelaksanaannya belum bisa berjalan dengan baik. (NISA, 2012).

Hambatan atau kendala yang terjadi seringkali berkaitan dengan pertarungan pendidikan, status sosial, ekonomi, serta pekerjaan lainnya. Hingga saat ini, pekerjaan perempuan masih tidak jarang diidentikkan dengan pekerjaan yang sulit berimbang dengan kaum laki-laki. Ada interim hambatan kultural terkait menggunakan faktor budaya yang hidup pada masyarakat yaitu menempatkan perempuan hanya sekedar tinggal di dalam rumah. Kini konsep kesetaraan gender disebut menjadi sebuah jawaban untuk mengatasi sebuah permasalahan perempuan di dalam dunia per-politikan tersebut. Gerakan ini telah berkembang menjadi gerakan massal yang sangat berpengaruh.

Motivasi kuat untuk berjuang, dipilih oleh partai politik sebagai kandidat, dipilih oleh para pemilih dan bekal dana yang memadai merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk melewati itu perempuan harus mengembangkan kualitas dan kapasitas dirinya baik rasa percaya dirinya maupun wawasan pengetahuan, meningkatkan cakrawala seni berpolitik seperti membentuk gagasan/pemikiran dan menyampaikan ide-ide dengan tegas.

Selain itu perempuan dapat memainkan peran strateginya dalam perjuangan bersama baik kepada lingkungan internalnya sendiri maupun kepada masyarakat luas dengan melakukan advokasi/sosialisasi Undang-Undang Politik, Pendidikan Politik kepada masyarakat serta sosialisasi konsep kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat terutama kepada laki-laki. Bila itu dilakukan secara intensive

maka persentasi peningkatan partisipasi perempuan itu sendiri di setiap partai nya pasti sedikit demi sedikit akan meningkat.

Pasal-pasal tersebut memberikan sebuah konsekuensi logis terhadap setiap orang dalam arti warga negara Indonesia baik laki-laki ataupun perempuan memperjuangkan haknya secara kolektif tanpa ada perlakuan yang bersifat diskriminatif. Jadi secara tidak langsung, perubahan terhadap UUD 1945 memberikan konsekuensi logis terhadap persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki karena selama ini dapat dilihat bagaimana peran perempuan dalam dunia politik sangatlah kurang.

Akibat dari hal tersebut, sistem pemilihan umum (pemilu) setelah reformasi juga mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik dan setelah itu dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 yang dalam beberapa pasalnya, menyebutkan :

1. Pasal 2 ayat (2) : “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
2. Pasal 2 ayat (5) : “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
3. Pasal 20 : “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.”

Diberikannya angka 30% pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR dalam upaya memberdayakan kaum perempuan di Indonesia agar mempunyai kesempatan yang sama untuk

berpartisipasi dalam dunia politik, khususnya masuk dalam struktur kepengurusan partai politik.

Keterwakilan perempuan di negara ini telah ditetapkan melalui kebijakan afirmasi (*affirmative action*), dalam aktivitas politik dan kebijakan publik negara republik Indonesia wajib ada kaum perempuan minimal 30%. Hal ini dicantumkan dalam undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan umum ataupun undang-undang pilkada yang berlaku diseluruh Negara Indonesia.

Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang baru makin memberikan keterwakilan perempuan di dunia politik, namun disisi lain juga memberikan tantangan bagi perempuan untuk menyakinkan kepada masyarakat maupun partai politik bahwa mereka layak untuk mengisi peluang politik dan siap berkompetisi dengan kaum laki-laki dimana kesiapan perempuan dalam dunia politik itu bukan satu hal yang mudah.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan perjuangan politik perempuan adalah komitmen perempuan itu sendiri baik individu maupun sebagai kelompok (organisasi) disamping didukung oleh laki-laki untuk menerima perempuan sebagai mitra dalam dunia politik dan bukan berarti perempuan meminta belas kasihan namun menuntut atau menginginkan laki-laki akan prinsip kesetaraan hak. Dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI akan selalu mendukung dalam rangka mencapai Visi pembangunan pemberdayaan perempuan yaitu terwujudnya kesetaraan Gender dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian kebijakan “affirmative action” atau pemberian perlakuan khusus yang diberikan kepada kaum perempuan merupakan upaya meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam dunia politik seperti keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sesuai UU No. 2 Tahun 2008 Jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut, setiap partai politik yang mempunyai fungsi rekrutmen politik dan pendidikan politik dapat memberdayakan kaum perempuan dalam kepengurusannya, untuk pemenuhan angka 30% dalam kepengurusan partai politik.

Upaya peningkatan partisipasi perempuan di dunia politik terutama dalam keterwakilannya di legislatif tidak bisa dilakukan secara *parsial*, karenanya harus dilaksanakan secara *Holistic Integratif* dengan melibatkan semua unsur sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ada peran-peran penting yang harus dilaksanakan perempuan untuk mempercepat upaya peningkatan partisipasi politik. Para pihak yang terkait erat dengan hal ini yaitu partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah termasuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga organisasi kemasyarakatan.

Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik memiliki cakupan yang luas sesuai dengan keluasan lingkup kehidupan publik itu sendiri. Ini mencakup bentuk partisipasi yang sederhana seperti memberikan hak suara dalam pemilihan umum, ikut serta dalam aksi demokrasi yang mempersoalkan efektivitas suatu kebijakan pemerintah, sampai pada bentuk-bentuk partisipasi yang lebih ‘berat’ seperti, membahas suatu rancangan undang-undang di lembaga legislatif. Keterlibatan perempuan dalam politik seringkali dikaitkan dengan kesetaraan gender yang ditetapkan dengan indikator capaian keterwakilan perempuan, yaitu proporsi kursi perempuan dalam lembaga perwakilan sebagai sebuah upaya peningkatan partisipasi politik perempuan (Norris, 2012).

Menurut teori perwakilan politik, para wakil memiliki dorongan untuk mewakili kepentingan-kepentingan mereka yang telah memilihnya atau yang mungkin memilih mereka dimasa depan meski mereka sendiri tidak ambil bagian

dalam kepentingan tersebut (Lovenduski, 2005). Ini juga merupakan wujud emansipasi yang diharapkan semua perempuan di Indonesia. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Wilayah Sumatera Selatan telah mengajak Perempuan dalam menggunakan hak nya untuk berpartisipasi di politik, serta ikut andil dalam politik. Dengan dibentuknya KPPI Wilayah Sumsel diharapkan dapat meningkatkan 30% angka keterwakilan perempuan pada konstelasi Politik.

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah pandangan *stereotype* bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “Penghuni” dapur/domestik, tidak bisa berpikir rasional dan, kurang berani mengambil risiko yang kesemuanya itu sudah menjadi *stereotype* perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum, sudah menarik kesimpulan yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Saparinah (Kompas, 2002 : 5), yaitu ketakutan dan keraguan anggota parlemen laki-laki mengenai gagasan peningkatan keterwakilan perempuan menunjukkan tiga hal: Pertama, mereka menganggap rendah kemampuan dan potensi perempuan dalam politik, Kedua, mereka tidak memahami bahwa perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dengan laki-laki yang diperlukan dan yang berguna dalam suatu proses demokratis. Ketiga, mereka takut disaingi perempuan bila jumlahnya di partai politik atau di lembaga politik seperti DPR kota maupun kabupaten sampai 30%.

Upaya tersebut, antara lain tercermin melalui lahirnya Undang-undang Partai Politik yang telah disahkan pada akhir Desember 2007, undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang pokok-pokok kedudukan dan peranan perempuan serta Undang Undang No 10 tahun 2009 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang yang memuat syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pendiri, kepengurusan partai politik dan sebagai calon anggota legislatif, merupakan

langkah afirmatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi politik perempuan. Lahirnya Undang-undang tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan dan proses politik, baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih (Gaffar, 2002).

Dalam konteks negara yang sedang membangun budaya demokrasi peningkatan kecerdasan politik kaum perempuan menjadi sangat penting, karena pada hakikatnya demokrasi itu sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Selain itu, kesamaan kedudukan antara warga negara laki-laki dan perempuan dalam menempati posisi jabatan menjadi sangat penting dan tentu banyaknya jumlah kaum perempuan di tingkat elite eksekutif maupun legislatif akan membawa dampak pada nasib perempuan itu sendiri secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam konteks negara demokrasi partisipasi kaum perempuan dari level bawah sampai tingkat elite.

Banyaknya kendala yang dihadapi perempuan di Indonesia enggan masuk di partai politik. Di awal tulisan ini, sudah disebutkan beberapa kendala tersebut. Pendidikan, pengetahuan, dan sosialisasi dalam keluarga memegang peran penting bagi para perempuan dan juga laki-laki dalam mengambil peran dan posisi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahami perempuan (dan juga laki-laki) harusnya juga dilihat pada konteks mereka berada, dan seperti apa dalam masyarakat? Walaupun secara formal semua aturan perundang-undangan yang ada sudah menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih luas terjadi di berbagai bidang. Di bidang politik, tema mengenai partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan perempuan menjadi tema sentral yang harus segera diselesaikan.

Keterwakilan anggota partai dalam kepengurusan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Keterwakilan Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Tahun	Jumlah anggota laki-laki	Jumlah anggota perempuan	Persentase perempuan
2015 - 2020	89	18	17%
2021- 2023	28	16	36 %

Keterangan : Karena anggota yang pindah tugas keluar kota

Tabel 1.2 Keterwakilan Perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Tahun	Jumlah anggota laki-laki	Jumlah anggota perempuan	Presentase perempuan
2020	36	14	28%
2021	56	25	31%

Keterangan : Karena banyak peng-kaderan baru

Meskipun sudah ada peraturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dimana dalam peraturan tersebut diatur mengenai isu representasi politik perempuan yang di dalamnya ditegaskan mengenai kuota perempuan di parlemen. Namun pada kenyataannya, kuota perempuan di dalam parlemen belum memenuhi 30% sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai bagian partisipasi perempuan dalam kepengurusan DPD PKS dan PKB Rumusan masalah tersebut dapat dirincikan dalam 2 pertanyaan penelitian:

- a. Apa alasan perempuan masuk ke dalam kehidupan politik di partai PKS dan PKB di DPC kota Palembang ?
- b. Apa kendala bagi perempuan masuk ke dalam kehidupan politik di partai PKS dan PKB di DPC kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh uraian yang lebih mendalam mengenai :

- a. Untuk mengetahui alasan perempuan masuk kedalam kehidupan politik partai di Kota Palembang
- b. Untuk mengetahui kendala perempuan dalam memasuki dunia politik di partai di kota Palembang itu sebenarnya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritik

Memberikan data tentang kehidupan perempuan dalam bidang politik dan mengembangkan kajian sosialisasi lanjutan politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung perempuan direkrut sebagai anggota partai di partai lainnya.

- Amaliatulwalidain Ramli, D. E. (2017). Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/2009/0>.
- Arikunto, S. (2002). sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, 107.
- Brandenburg, R. (2016). Iran and the Palestinians. *Iran Region Brandenburg Palestinians Jan 2016*, 1.
- Gaffar. (2002). Undang-undang tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan dan proses politik, baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih, 45.
- Gaffar. (2002). Undang-undang tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan dan proses politik, baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih, 45.
- ideologi patriarkis dan seksisme, y. j. (2009). *blakely, press*.
- Lovenduski, B. S. (2005). *Cambridge University Press*, 53.
- McClosky. (1972). *Political Participation*. New York: The Macmillan Company.
- Norris, P. (2012). Making Democratic Governance Work: How Regimes Shape Prosperity, Welfare, and Peace. *Cambridge University Press*.
- Ramadhani, F. A. (2021). peran perempuan dalam politik di indonesia. *Journal ilmu hukum*.
- Sakaria, N. &. (2015). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang politik, 178.
- Sari, N. P. (2017, November 24). Retrieved from <https://dprd.sumselprov.go.id/workshop-peran-perempuan-dalam-kepemimpinan-resmi-dibuka-ketua-dprd-provinsi-sumsel/>.

Strong, C. F. (2019). Retrieved from <https://www.rodadunia.com/>:
<https://www.rodadunia.com/>

surbakti, r. (2007). pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik, 141.

Tridewiyanti, K. (2012). KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI BIDANG POLITIK “PENTINGNYA PARTISIPASI DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF” (GENDER EQUALITY AND JUSTICE IN FIELD OF POLITICS “THE IMPORTANCE OF PARTICIPATION AND REPRESENTATION OF WOMEN IN LEGISLATIVE”). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/377>, 01.

Undang-undang tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan dan proses politik, b. s. (2002). *Gaffar*, 45.



**DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA KE PARTAI Keadilan
SEJAHTERA (PKS) KOTA PALEMBANG**